

KEMISKINAN DAN PENDIDIKAN

Oleh: Fathurrohman¹



Pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudoyono benar-benar sedang mendapat banyak ujian. Permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang tidak ujung selesai, di tambah dengan kasus lumpur lapindo, gempa bumi, busung lapar, gizi buruk, langkanya BBM, banyaknya siswa yang tidak lulus dalam UAN (Ujian Akhir Nasional) dan masih banyak lagi sederetan masalah yang belum tahu sampai kapan masalah tersebut dapat di atasi. Realitas tersebut tidak bisa kita pungkiri begitu saja. Pertanyaan muncul kemudian adalah Salah siapa sebenarnya? Tulisan ini tidak bermaksud untuk menyalahkan siapapun, namun mencoba untuk membongkar kemelut yang sedang di hadapi oleh bangsa Indonesia.

Kalau boleh berkata secara jujur, masyarakat Indonesia mempunyai beban hidup yang sangat berat, belum lagi untuk memikirkan pendidikan anak-anaknya. Kebijakan pemerintah boleh dikatakan belum memihak kaum kecil. Walaupun sebenarnya tugas dari negara adalah untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar (UUD 1945 Pasal 34 Ayat (1)). Realitas ini di dukung dengan data Susenas yang membuktikan program pemberantasan kemiskinan tidak berjalan dengan baik. Terbukti rakyat miskin yang mendapatkan kartu sehat hanya 26,53 persen, beasiswa 33,34 persen, beras untuk rakyat miskin 25,93 persen, kredit usaha di bawah Rp 10 juta Cuma 9.89 persen (*Republika, 15 Maret 2005*).

Berbicara masalah kemiskinan tidak akan terlepas dengan masalah pendidikan, demikian juga sebaliknya. Para ahli ilmu social berpendapat bahwa kemiskinan erat kaitannya dengan rendahnya tingkat pendidikan. Hal ini berdasarkan penelitian di negara-negara maju maupun berkembang yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang dikategorikan "miskin" memiliki pendidikan lebih rendah dibanding dengan kelompok masyarakat lainnya. Fakta menunjukkan bahwa kelompok miskin itu sebagian besar adalah kaum muslimin

di berbagai negara. Di Indonesia, misalnya, bisa dipastikan bahwa sebagian besar dari kelompok masyarakat yang dikategorikan "masih hidup di bawah garis kemiskinan" itu adalah umat Islam yang berpendidikan rendah atau sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan

Persoalannya adalah bukan berarti umat Islam Indonesia tidak mau sekolah atau kurang memiliki potensi akademik yang layak, tetapi pendidikan yang baik dan efektif itu mahal. Anak-anak dari masyarakat muslim yang miskin tidak dapat mengikuti pendidikan yang layak dan efektif, karena kurangnya sumber biaya yang diperlukan untuk pendanaan pendidikan mereka. Akibatnya, kelompok masyarakat miskin ini hanya menikmati pendidikan yang "kurang efektif" atau sama sekali tidak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mereka menjadi "kurang mandiri dan produktif" dan hasil pendidikannya kurang berfungsi dalam mengubah kemiskinan.

Disamping itu *output* dari pendidikan selama ini belum mengarah kepada konsep kemandirian, dan produktifitas. Hal ini yang menyebabkan pendidikan belum mampu menjadi wahana mobilitas sosial dan investasi masa depan. Untuk mewujudkan itu semua, maka dalam pendidikan itu harus memuat penerapan konsep *life skills* dengan menggunakan pendekatan *quantum learning*. Pembelajaran *life skills* merupakan proses pendidikan yang melatih individu-belajar agar memiliki kapasitas sosial tanpa jenjang pendidikan yang berkelanjutan. Orientasi pembelajaran *life skills* dikembangkan melalui metode pengajaran *quantum learning* yaitu pengondisian proses belajar aktif hingga siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu serta potensi bagi pengembangan keterampilan lebih lanjut. Metode *quantum learning* berkaitan dengan model pembelajaran *life skills* bagi siswa-siswa yang siap bekerja dan mengembangkan pengetahuan. Dengan adanya bekal tersebut maka siswa sudah mampu untuk mandiri selepas kelulusannya, dan pendidikan bisa menjadi investasi di masa depan.

Namun itu semua tidak bisa berjalan tanpa adanya biaya pendidikan. Pendidikan sekarang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pendidikan yang efektif membutuhkan biaya yang mahal. Menyikapi persoalan tersebut pemerintah

mengambil kebijakan dengan memberikan biaya gratis untuk pendidikan sekolah dasar. Artinya adalah orang tua tidak perlu membayar biaya untuk sekolah anaknya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah mungkin pemerintah merealisasikan pembiayaan pendidikan gratis? Untuk anggaran biaya pendidikan yang telah dianggarkan 20% dari APBN saja selama ini belum terealisasi. Pemerintah selama ini baru mampu membiayai pendidikan berkisar antara 3-4%. Artinya adalah kemungkinan pemerintah untuk membiayai pendidikan gratis tidak mungkin. Sehingga diperlukan dana lain yang bisa membantu program pemerintah. Karena pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga tanggung jawab kita bersama.

Sebenarnya umat Islam, khususnya di Indonesia, memiliki sumber daya ekonomi yang sangat potensial untuk dikelola sebagai sumber pembiayaan pendidikan bagi masyarakat muslim yang miskin, yaitu zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS). Kita belum sadar bahwasannya dalam harta kita ada hak untuk orang lain yaitu fakir miskin. Kalau kita kaji kembali makna dan tujuan hakiki ayat ke 60 dari surat Attaubah yang selama ini dijadikan patokan pemanfaatan zakat (termasuk infaq dan shodaqoh), maka kita lihat bahwa fungsi utama zakat adalah menolong dan meringankan beban manusia agar terlepas dari "kemiskinan hakiki". Oleh karena itu, prioritas utama pemanfaatan zakat adalah untuk kelompok masyarakat faqir dan miskin. Selama ini pemanfaatan zakat hanya untuk menolong kelompok faqir miskin dengan pertolongan "jangka pendek" untuk terlepas dari kemiskinan material, tetapi belum melepaskan mereka dari kemiskinan strukturalnya. Kemiskinan struktural hanya bisa dilepaskan dengan proses pendidikan yang efektif yang membekali ketrampilan hidup bagi mereka. Mudah-mudahan dengan tulisan ini kita sadar akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat muslim.

Wallahu a'lam bishawab